

ADA WARGA NGUTANG RP1 JUTA BAYAR RP10 JUTA

DPRD Bogor Bikin Raperda Soal Pinjol, BK dan Rentenir

BOGOR (IM)-DPRD Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online (Pinjol), bank keliling (BK), koperasi liar dan rentenir.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Puwanti, mengungkapkan latar belakang diusulkannya raperda ini adalah karena banyaknya aduan yang masuk ke DPRD dari korban Pinjol, bank keliling, dan rentenir.

"Latar belakangnya adalah banyaknya kasus di masyarakat lebih kearah dampak negatif dari Pinjol, bank keliling, rentenir, dan Koperasi liar," ungkap Endah Rabu (18/5).

Endah melanjutkan, dirinya mendapatkan keluhan di mana salah satu warga meminjam Rp1 juta, namun harus mengembalikan uang hingga Rp 10 juta karena tingginya bunga.

Bahkan, dijabarkan oleh Endah, bunga yang harus dibayar sebesar Rp300 ribu tiap pekannya. "Bahkan ada juga yang kehilangan rumah dan menyebabkan rumah tangganya cerai," terang Endah.

Endah menegaskan, karena banyaknya kasus yang diterima oleh DPRD Kota Bogor, Raperda ini perlu segera dibahas agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian perlindungan dari

pinjaman online, rentenir dan koperasi ilegal.

"Akhirnya kami mengusulkan, ini harus dibuat sebuah perlindungan. Jadi arah raperda ini adalah bagaimana arahnya perlindungan kepada masyarakat. Bagaimana ke depannya masyarakat Kota Bogor bisa dilindungi dari hal-hal yang sifatnya dampak negatif," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa 10 Mei 2022, terdapat tiga raperda yang akan dibahas pada masa sidang ketiga tahun sidang 2022 ini.

Di antaranya adalah Raperda Kota Bogor Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Raperda Kota Bogor Tentang Penyelenggaraan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor dan

Raperda Kota Bogor Tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir. "Selain itu juga terdapat beberapa Raperda yang belum selesai dan masih dalam tahap pembahasan panitia khusus dan serta terdapat beberapa Raperda yang dalam tahap fasilitasi Gubernur Jawa Barat," terangnya. ● **gio**

Ridwan Kamil Kunjungan Kerja ke Eropa Temui Investor

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Eropa untuk bertemu dengan investor dari sejumlah negara. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Ika Mardiah mengatakan, Gubernur Ridwan Kamil bersama pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan bertolak Rabu (18/5).

Salah satu agenda Ridwan Kamil adalah menjajaki kerja sama di bidang energi baru terbarukan. Kunjungan ke Eropa direncanakan hingga 27 Mei 2022. Dalam rangkaian kunjungan kerja itu antara lain Ridwan Kamil diagendakan ke Kota Assisi, Italia pada 21-22 Mei 2022, dan berlanjut pertemuan di Roma pada 23 Mei 2022.

Kepastian agenda ini diperoleh setelah Ridwan Kamil menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Italia untuk Indonesia HE Benedetto Latteri di Gedung Pakuan, Kota Bandung pada Sabtu (14/5).

Kedatangan Benedetto saat ini bersama Filippo d'Antoni selaku Branch Director Ansaldo Energia

Indonesia. Dalam pertemuan tersebut selain membahas tentang rencana proyek kerja sama dalam bidang pengembangan energi, juga memperkenalkan perusahaan Ansaldo Energia.

Ansaldo Energia merupakan perusahaan asal Italia yang bergerak di bidang pengembangan energi dan peralatan listrik seperti turbin gas dan uap, generator dan mikro turbin. Perusahaan yang berpusat di Italia tersebut telah memiliki cabang dalam skala internasional yang berlokasi di Swiss, Uni Emirat Arab, Rusia, Amerika Serikat, dan China.

Selain itu, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil juga dijadwalkan bertemu dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di Roma terkait digitalisasi perdesaan dan ketahanan pangan Jawa Barat. Dia akan bertemu pula dengan Charles DA Ruffalo, Chief Relationship Officer dari GRNBI BV.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Emil juga akan mengunjungi beberapa provinsi di negara Eropa untuk menjalin kerja sama melalui program sister province. ● **pra**



IDN/ANTARA

UPAYA PENGGUNAAN STADION GBLA UNTUK LIGA 1

Foto udara Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/5). Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengupayakan agar Stadion GBLA dapat digunakan tim Persib Bandung untuk kompetisi Liga 1 2022-2023 yang hingga saat ini proses administratif terkait pengelolaan sedang berjalan dan terukur.

Bulog Cirebon Salurkan 730 Ton Kedelai Subsidi bagi Perajin Tahu Tempe

CIREBON (IM)- Kantor Cabang Bulog Cirebon, Jawa Barat, telah menyalurkan sebanyak 730 ton kedelai subsidi bagi perajin tahu dan tempe melalui koperasi produsen tempe dan tahu Indonesia (Kopti) yang berada di wilayah kerjanya. "Sampai saat ini kita sudah menyalurkan 730 ton kedelai subsidi," kata Waka Pimpinan Cabang Bulog Cirebon, Abdillah Luhur di Cirebon, Rabu (18/5).

Menurutnya jumlah tersebut disalurkan kepada perajin tahu dan tempe yang berada di Kabupaten Cirebon sebanyak 270 ton, Kota Cirebon 40 ton, Kabupaten Majalengka 430 ton, dan 450 ton untuk Kabupaten Kuningan. Abdillah mengatakan penyaluran kedelai subsidi tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan biaya produksi perajin tahun dan

tempe. Pada tahap awal lanjut Abdillah, Bulog Cirebon berencana akan menyalurkan sebanyak 920 ton cadangan stabilitas harga pangan (CSHP). "Jumlah tersebut untuk empat daerah se wilayah operasional Bulog Cirebon," ujarnya.

Abdillah menambahkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah pada kedelai sebesar Rp 1.000 per kilogram. Sehingga nantinya para perajin bisa mendapatkan harga kacang kedelai sesuai kemampuan mereka yaitu Rp 10.250 per kilogram.

Saat ini lanjut Abdillah, harga kacang kedelai masih dikeluhkan oleh para perajin, sehingga pemerintah memberikan subsidi. Agar usaha mereka bisa terus berjalan. "Harga yang bisa ditebus oleh perajin tahu dan tempe per kilogram Rp 10.250," katanya. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

SAMBUT HARI JADI KE-729 KOTA SURABAYA

Petugas memasang lampu hias di Monumen Bambu Runcing, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/5). Pemasangan lampu hias itu untuk menyambut Hari Jadi ke-729 Kota Surabaya.

POLITIK KABUPATEN BOGOR KIAN PANAS

PDI Perjuangan Lirik Jaro Ade di Pilbup 2024

Selain dimungkinkan diusung oleh Partai Golkar, Jaro Ade yang pada pemilihan bupati (Pilbup) Bogor sebelumnya menjadi pesaing ketat Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin, juga sudah dilirik oleh PDI Perjuangan. Dari segi figur, sosok Jaro Ade sebagai orang yang humble atau mudah bergaul dengan siapa saja.

CIBINONG (IM)- Nama Ade Ruhendi alias Jaro Ade naik lagi. Dia disebut-sebut bakal maju pada Pilbup Bogor

2024. Bahkan ikut dilirik PDI Perjuangan.

Selain legislator Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya,

nama Ade Ruhendi alias Jaro Ade juga masuk dalam radar dan kian menguat untuk dimajukan kembali menjadi Calon Bupati Bogor periode 2024-2029.

Ade Ruhendi adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor pada periode sebelumnya. Jaro Ade juga maju sebagai Calon Bupati Bogor pada Pilbup Bogor 2018 lalu.

Selain dimungkinkan diusung oleh Partai Golkar, Jaro Ade yang pada pemilihan bupati (Pilbup) Bogor sebelumnya menjadi pesaing ketat Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin, juga sudah dilirik oleh PDI Perjuangan. "PDI Perjuangan bukan partai tertutup, tetapi

partai yang terbuka. Termasuk bersama Partai Golkar bakal mengusung Jaro Ade menjadi Calon Bupati Bogor periode 2024-2029," kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor Bambang Gunawan kepada wartawan, Rabu (18/5).

Bambang Gunawan menerangkan, bahwa pada Musda Partai Golkar Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu di Surat keputusan (SK) DPP Partai Golkar menyebutkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Hikil Kurdi dan Calon Bupati Bogor, Jaro Ade. "Pernyataan Jaro Ade se-

bagai Calon Bupati Bogor itu kan ada SK dari DPP Partai Golkar, masa Partai Golkar mau membongkangi kadernya," terang Bambang Gunawan.

Dari segi figur, pria yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu menilai sosok Jaro Ade sebagai orang yang humble atau mudah bergaul dengan siapa saja.

"Jaro Ade orangnya humble, pergaulannya luas, baik antar lintas partai politik, profesi atau lainnya tanpa memandang status. Kalau saya telepon, ia pasti menjawab atau ia telepon balik," ungkap BG sapaan akrab Bambang Gunawan. ● **gio**

Ade Yasin Diduga Kumpulkan Uang untuk Operasional Tim Pemeriksa BPK

JAKARTA (IM)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pengumpulan uang atas perintah tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY) sebagai dana operasional tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama proses audit laporan keuangan Pemkab Bogor berlangsung.

KPK mengonfirmasi hal tersebut melalui pemeriksaan sembilan saksi untuk tersangka Ade Yasin dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/5). "Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah dari tersangka AY untuk mengumpulkan sejumlah uang yang kemudian diduga dibenarkan kepada tersangka ATM dan kawan-kawan sebagai dana operasional pemeriksa selama proses audit berlangsung," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/5).

Sembilan saksi, yakni Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Anif Rahman, Kasubbid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Yeni Naryani, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Ciawi Kabupaten Bogor, Irman Gapur, Wakil Direktur RSUD Ciawi Kabupaten Bogor, Yuki Meistisia Anandaputri.

Berikutnya, staf bagian

keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Deri Harianto, staf di Bappenda Kabupaten Bogor, Mika Rosadi, staf di Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan serta dua staf outsourcing di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Nadia Septiyani dan Tubagus Hidayat. KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021.

Sebagai pemberi ialah Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA), Kasubbid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA), dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT).

Sedangkan empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/ Kasub Auditorat Jabar III/Pengendalian Teknis, Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa, Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNKR), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa, Gerri Ginajar Tri Rahmatullah (GGTR).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan AY berkeinginan agar Pemkab Bogor

kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Lalu, BPK Perwakilan Jawa Barat mengasaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor. Tim pemeriksa yang terdiri atas ATM, AM, HNRK, GGTR, dan Winda Rizmayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Sekitar Januari 2022, KPK menduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim. KPK mengungkapkan AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat "opini disclaimer". Selanjutnya, AY merespons dengan mengatakan "diusahakan agar WTP".

Sebagai realisasi kesepakatan, IA dan MA diduga memberikan uang sejumlah sekitar Rp100 juta dalam bentuk tunai kepada ATM di salah satu tempat di Bandung. ATM kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA di mana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu. ● **pp**

Sekda Kab. Bogor Sampaikan LKPJ



IST

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin saat menyampaikan LKPJ ke DPRD.

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Burhanudin mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor tahun anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (17/5).

Dalam kesempatan itu Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang perlu segera ditindaklanjuti. Sebagaimana tercermin dari hasil rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD terhadap LKPJ Bupati Bogor tahun 2021, baik dalam bentuk saran, masukan, maupun koreksi yang positif dan konstruktif.

"Seluruh hasil rekomendasi dan catatan strategis, akan kami perhatikan serta ditindaklanjuti secara serius, bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah, termasuk jajaran BUMID," kata

Burhanudin. Burhanudin menjelaskan, Pemkab telah berupaya secara maksimal untuk mencapai sasaran RKPD tahun 2021 dengan terus meningkatkan kerjasama, koordinasi dan konsolidasi baik secara internal maupun lintas sektor dengan para pemangku kepentingan. "Kami menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Ia menambahkan, semoga mekanisme check and balances dan kerjasama yang baik akan senantiasa terjalin, demi perbaikan dan peningkatan kinerja serta tercapainya visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadilan.

Rapat Paripurna ini dihadiri Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bogor, segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Direksi BUMD dan pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. ● **gio**

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan Pastikan Pelayanan Berjalan Baik

CIBINONG (IM)-Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyatakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. "Intinya beliau menanyakan langsung dan memberi dukungan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ungkap Iwan.

Lebih lanjut Iwan menerangkan, Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang hadir mendampingi Jokowi juga turut menyemangatkan. Sama seperti Presiden, Risma juga meminta pelayanan untuk warga Bogor tak boleh berhenti. "Alhamdulillah Bu Risma juga memberi nasihat. Tadi sempat ngobrol dengan beliau dan harapannya sama, minta pelayanan kepada masyarakat jangan terganggu. Pak Danrem, Pak Kapolda Jabar juga sama, sempat meringkuk saya dan berdoa. Alhamdulillah ini jadi motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat," terang Iwan. ● **gio**



IDN/ANTARA

PENCEGAHAN WABAH PMK DI RUMAH POTONG HEWAN

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di kandang penampungan UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/5). Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupaya mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) khususnya di RPH dengan memastikan dokumen kesehatan, penyemprotan disinfektan, pemeriksaan kesehatan secara berkala serta menyiapkan ruang isolasi untuk hewan ternak.